

Tinjauan Atas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kegiatan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Melalui Skema Build Operate Transfer = Review on the Imposition of Value Added Tax on Drinking Water Supply System Business Activities Through the Build Operate Transfer Scheme

Sinaga, Raja Darius Sutardjo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920575482&lokasi=lokal>

Abstrak

Tulisan ini mengkaji bagaimana pengenaan PPN terhadap usaha yang melakukan kegiatan SPAM melalui Skema BOT (PT X). Hal ini sehubungan dengan pengaturan PP 49 Tahun 2022 bahwa air minum sebagai hasil pengelolaan SPAM dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga PT X menganggap usahanya dibebaskan dari PPN. Padahal esensi skema BOT adalah investasi dan pengelolaan infrastruktur publik yang tujuan akhirnya mengalihkan infrastruktur tersebut ke sektor publik. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, peneliti menganalisis kontrak BOT PT X, peraturan perundang-undangan terkait KPBU, SPAM dan PPN, serta sengketa pajak PT EPE yang menyelenggarakan proyek infrastruktur publik PLTG yang menghasilkan barang dibebaskan dari PPN (listrik) dengan skema sejenis yaitu BOOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk usaha SPAM dengan skema Build-Operate-Transfer (BOT) merupakan model KPBU pemanfaatan BMN. Adapun pengenaan PPN nya adalah terutang PPN. Bentuk penyerahan adalah penyerahan JKP atas jasa pembangunan dan pengelolaan fasilitas atau penyerahan BKP infrastruktur yang dibayar selama masa konsesi. Penyerahan air bersih yang dibebaskan PPN dilakukan oleh sektor publik.This paper examines how VAT is imposed on businesses that carry out Drinking Water Supply System (SPAM) activities through the BOT Scheme (PT X). This is in line with Regulation PP 49 of 2022, which exempts drinking water resulting from SPAM management from VAT. Therefore, PT X considers its business to be VAT-exempt. The essence of the BOT scheme is the investment and management of public infrastructure, with the ultimate goal of transferring ownership of the infrastructure to the public sector. Using normative legal research methods, researchers analyzed PT X's BOT, regulations related to KPBU, SPAM, and VAT, as well as the tax dispute of PT EPE, which organizes public gas-fired power plant infrastructure projects that produce goods exempt from VAT (electricity) through a scheme like BOOT. The results of the study indicate that the SPAM business form with the Build-Operate-Transfer (BOT) scheme is a PPP model for utilizing State-Owned Assets. The imposition of VAT is VAT payable. The form of transfer is the transfer of JKP for construction services and facility management, or the transfer of BKP infrastructure paid during the concession period. The transfer of clean water exempted from VAT is carried out by Public Sector.